



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM RI DAN KETUA BADAN PENGEWAS
PENYELENGGARA PEMILU RI**

- Tahun Sidang** : 2023-2024
Masa Persidangan : V
Rapat ke- : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Senin, 10 Juni 2024
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III
Gedung Nusantara I DPR RI
- Acara Rapat** : 1. Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RABPN Tahun Anggaran 2025;
2. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025; dan
3. Evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024.
- Waktu Rapat** : Pukul 10.30 s.d. 12.15 WIB
Ketua Rapat : Saan Mustopa, M.Si.
(Wakil Ketua/F-Nasdem)
- Sekretaris Rapat** : Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
(Kabag Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir** : 26 dari 49 orang Anggota dengan rincian:
A. ANGGOTA DPR RI
PIMPINAN:
1. Saan Mustopa, M.Si.
(Wakil Ketua/F-Nasdem)
2. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN**
6 orang Anggota dari 11 Anggota:
1. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
2. Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
3. Riyanta, S.H.
4. H. Heru Sudjatmoko
5. Drs. Cornelis, M.H.

6. Ir. Hugua

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

3 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
2. Drs. H. Riswan Tony D. K.
3. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M. H., M. Kn.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA

3 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.
2. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
3. Drs. Difriadi

4. FRAKSI PARTAI NASDEM

4 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.
2. Dr. Ujang Iskandar, S.T., M.Si.
3. Kamran Mochtar Podomi, S.T.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

3 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. Reza Oktoberia, S.H.
2. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.
3. H. Mohammad Muraz, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Teddy Setiadi, S.I.Kom.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Khairul Muhtar, S.E., M.M.
3. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

2 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Dra. Hj. Munawaroh

Anggota yang Izin/Sakit:

1. Paryono

2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.

B. UNDANGAN

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI
(Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.);
2. Ketua Badan Pengawas Penyelenggara
Pemilu RI (Rahmat Bagja, S.H., L.LM.).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Kita mulai ya.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi,

Salam sejahtera buat kita semua,

**Yang terhormat saudara Ketua KPU beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat saudara Ketua Bawaslu RI beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat para anggota Komisi II DPR RI,**

Lebih dahulu, marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah *Subhanahu wa taala*. Karena hanya atas perkenannya, kita dapat menghadiri rapat Komisi II DPR RI dengan Saudara Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional di bidang anggaran pada hari ini dalam keadaan sehat *walafiat*.

Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat pada hari ini, daftar telah ditandatangani oleh mayoritas anggota dari 49 anggota dan dari 9 fraksi. Oleh karena itu, kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Maka, perkenankan kami membuka rapat dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara atas kehadirannya memenuhi undangan dalam rapat hari ini. Demikian juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Sesuai dengan jadwal atau siklus anggaran yang dikeluarkan oleh Badan Anggaran DPR RI, menugaskan kepada seluruh komisi-komisi agar melakukan rapat dengan mitra kerjanya dalam rangka membahas RKA-KL dan

RKP-KL Tahun 2025 yang hasilnya nanti akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI. Oleh karena itu, kami akan menawarkan dan sekaligus meminta persetujuan mengenai acara Rapat Kerja Rapat Dengar Pendapat pada hari ini, yaitu:

- Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2025,
- Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025; dan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 sampai dengan bulan Mei Tahun 2024.

Setuju, ya?

(RAPAT: SETUJU)

Acaranya tunggal karena ini kan baru penyampaian pagu indikatif saja. Jadi, kita cuma mendengarkan dari mitra. Nanti yang akan kita bahas setelah tanggal 16 Agustus. Nanti masih ada dua tahap ke depan setelah tanggal 16 Agustus dan biasanya kita lakukan konsinyering.

Nah, rapat. bisa kita akhiri jam 11.00 kalau cuma mendengarkan saja pembahasan kan ya, nanti?

Setuju ya? Jam 11.00, ya?

Pak Wahyu setuju, ya?

(RAPAT: SETUJU)

Belum. Rapat dimulai, jam 11.00 mulainya.

Bahwa rapat ini hari ini adalah dalam rangka menjalankan salah satu fungsi DPR, yaitu fungsi anggaran. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI ingin mendengarkan penyampaian penjelasan dalam rangka:

- Pembicaraan pendahuluan Pembahasan RAPBN Tahun 2025;
- Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025; dan
- Evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024.

Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Saudara-Saudara untuk menyampaikan penjelasannya. Saya mulai dari Ketua KPU.

Kami persilakan.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, dan

Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Yang kami hormati Pimpinan Komisi II DPR RI,

**Yang kami hormati Ibu/Bapak Para Anggota Komisi II DPR RI,
Yang kami hormati Ketua Bawaslu beserta Sekjen dan jajaran,
Yang kami hormati Para Anggota KPU beserta Sekjen dan jajaran,**

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, KPU, untuk menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023-2024 dan rencana program dan anggaran untuk tahun 2025.

Yang pertama, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023. Pagu anggaran KPU tahun 2023 adalah sebanyak Rp20.256.596.163.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp19.624.808.435.400,00 atau setara dengan 96,88%. Realisasi anggaran tersebut per program:

- untuk dukungan teknis 96,70%; dan
- untuk dukungan manajemen 98,60%.

Selanjutnya untuk, untuk pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023, komposisi anggaran KPU untuk per satuan kerja:

- KPU Pusat pagu Rp1.666.940.319.000,00. Realisasinya Rp1.590.242.043.523,00. Sisa 76 miliar, ya. Rp76.694.275.477,00 atau setara dengan 95,40%;
- Untuk satuan kerja KPU Provinsi pada 38 provinsi Rp2.001.527.123.000,00. Realisasi Rp1.830.060.434.859,00. Sisanya Rp171.466.688.141,00 atau setara dengan 91,43%;
- Untuk KPU Kabupaten/Kota pada 514 kabupaten/kota, pagu anggarannya adalah Rp16.588.128.721.000,00. Realisasinya Rp16.204.505.957.019,00. Sisanya Rp383.622.763.981,00 rupiah atau setara dengan 97,69%.

Selanjutnya, pada sepanjang halaman 9.

Pelaksanaan anggaran tahun 2023, beberapa penghargaan yang dicapai oleh KPU selama tahun 2023. Di antaranya adalah:

- Yang pertama, KPK merilis hasil survei penilaian integritas SPI 2023 dengan skor indeks 70,97 dari skala 0-100. Bahwa KPU murni skor survei penilaian integritas sebesar 73,24. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional sebesar 71,94 yang diperoleh dari komponen internal dan eksternal;
- Kedua, Menteri Keuangan memberikan penghargaan Anugerah Reksa Banda tata kelola aset kepada Kementerian dan Lembaga dan *stakeholder* di bidang pengelolaan milik negara dan lelang;
- Yang ketiga, KPU menerima penghargaan Anugerah Perhumas dalam kategori Humas Pemerintah;
- Yang keempat, KPU menerima anugerah sebagai "Instansi Terbaik Kedua" pada kategori instansi teraktif dalam pendaftaran PSE Lingkup Publik Tingkat Kementerian dan Lembaga tahun 2023 yang diberikan Menteri Komunikasi dan Informatika; kemudian
- Yang kelima, memperoleh sertifikat ISO 27001:2022, Standar Internasional Keamanan Informasi; kemudian

- Yang keenam, memperoleh dan mempertahankan sertifikat ISO 90001:2015, Standar Manajemen Mutu pada Biro Sumber Daya Manusia.

Untuk evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024, Pagu anggaran KPU pada tahun-

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Interupsi, Pimpinan.

Yang bahan ini, kami enggak mendapatkan.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Baik .

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Ada?

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Seperti siapkan yang-

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Yang ini sudah, Sekretariat

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Yang PPT?

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Ada di sini?

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Kami siapkan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Bingung juga saya ini.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Baik. Segera kami siapkan.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Dapat kami lanjutkan?

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Ya.

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Ya.

Untuk pelaksanaan anggaran tahun 2024, Pagu anggaran KPU tahun 2024 sebesar Rp28.398.893.459.000,00. Realisasi anggaran sebesar 73,78% atau setara dengan Rp20.952.075.872.941,00 per tanggal 28 Mei 2024. Secara presentasi, persentase:

- Untuk dukungan teknis sampai dengan 28 Mei 2024, 76,16%; kemudian
- Untuk dukungan manajemen sebesar 44,10%.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan anggaran komposisi anggaran KPU berdasarkan Satker:

- Untuk KPU Pusat, pagu anggaran adalah Rp4.304.711.657.000,00. Realisasinya adalah Rp666.067.928.360,00. Masih ada sisa Rp3.638.643.728.640,00 atau setara dengan 15,47%;
- Untuk KPU Provinsi, pagu anggaran adalah dua, Rp2.896.871.001.000,00. Realisasinya adalah Rp1.388.807.414.208,00. Masih sisa Rp1.508.063.586.792,00 atau setara dengan 47,94%.
- Untuk satuan kerja KPU Kabupaten/Kota pada 514 kabupaten/kota, pagu anggaran adalah Rp21.197.310.801.000,00. Realisasinya adalah Rp18.897.200.530.373,00. Masih ada sisa Rp2.300.110.270.627,00 atau setara dengan 89,15%.

Selanjutnya, halaman 18.

Untuk kurun waktu tahun anggaran 2024, penghargaan yang diperoleh KPU adalah pada bulan Mei tahun 2024. KPU memperoleh penghargaan dari pemerintah dengan kategori "Penghargaan Terbaik dari Pemerintah dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kategori Lembaga Pemerintahan", yang disampaikan dalam forum *Digital Government Award SPBE Summit 2024*.

Yang terakhir, rencana kerja KPU tahun 2025. Halaman 19.

Berdasarkan surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B-201/D.8/PP.06.03/04/2024 dan Menteri Keuangan surat Menteri Keuangan nomor S-346/MK.02/2024 tanggal 5 April 2024, KPU memperoleh Pagu indikatif sebesar Rp3.062.311.327.000,00. Yang komposisinya adalah:

- Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebanyak atau sebesar Rp290.243.036.000,00. Komposisinya 9,48%; kemudian
- Untuk program dukungan manajemen sebanyak Rp2.772.068.291.000,00 atau setara dengan 90,52%.
- Untuk program, untuk belanja operasional pegawai sebesar Rp1.547.640.191.000,00 atau setara dengan 50,54%;
- Belanja operasional kantor untuk KPU Pusat, 438 KPU Provinsi, dan 514 KPU Kabupaten/Kota sebesar Rp1.042.671.136.000,00 atau setara dengan 34,05%;
- Belanja non-operasional sebesar Rp472.000.000.000,00 atau setara dengan 15,41%.

Selanjutnya, rencana kerja KPU tahun 2025. Gambaran umum program atau kegiatan KPU tahun 2025:

- Satu, yaitu pada tahun ini merupakan tahun transisi waktu penyelenggaraan Pemilu (*pre-election*);
- Yang kedua, KPU perlu melakukan penguatan-penguatan internal pada program dukungan manajemen, yaitu:
 - Penataan organisasi KPU atau SOTK;
 - Penguatan kelembagaan SDM KPU melalui diklat dan pelatihan teknis;
 - Peningkatan sarana dan prasarana layanan perkantoran;
 - Penataan BMN, baik itu penghapusan maupun pengarsipan dan pemeliharaan.
- Yang ketiga, KPU akan melakukan kegiatan-kegiatan pasca tahapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, yaitu:
 - Evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2025;
 - Penyiapan regulasi Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2029;
 - Penguatan atau integrasi sistem informasi Pemilu;
 - Pendataan pemilih berkelanjutan; kemudian
 - Pendidikan pemilih pemula dan kelompok rentan/marginal.

Selanjutnya, rencana kerja KPU tahun 2025, program penyelenggaraan pemilu dan proses konsolidasi demokrasi:

1. Yang pertama, kegiatannya berupa pengelolaan pengadaan laporan dan dokumen logistik. Anggarannya adalah 20.611.520.000,00; kemudian
2. Kedua, penguatan kualitas peraturan perundang-undangan. penguatan kualitas perundang-undangan sebesar Rp7.019.140.000,00; kemudian
3. Ketiga, hubungan masyarakat, informasi publik, dan pendidikan pemilih. Anggarannya adalah Rp152.346.030.000,00;
4. Yang keempat, advokasi dan sengketa hukum sebanyak Rp5.043.010.000,00;
5. Yang kelima, teknis penyelenggaraan Pemilu/pemilihan, yaitu fasilitasi pengelolaan desain surat suara, dokumentasi, daerah pemilihan, dan alokasi kursi. Sebanyak, sebesar Rp5.003.750.000,00;

6. Yang keenam, pemilihan pada daerah otonomi baru, empat DOB. Itu sebesar Rp100.219.586.000,00.

Untuk program dukungan manajemen:

1. Yang pertama, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara sebesar Rp1.559.593.801.000,00;
2. Yang kedua, manajemen perencanaan dan organisasi sebesar Rp16.248.337.000,00;
3. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia sebesar Rp10.798.950.000,00;
4. Yang keempat, operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana sebesar Rp1.064.786.486.000,00;
5. Yang kelima, pemeriksaan internal KPU yaitu layanan audit internal sebesar Rp15.610.303.000,00;
6. Yang keenam pengelolaan data dan informasi sebesar Rp90.030.414.000,00; kemudian
7. Yang ketujuh pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp15.000.000.000,00.

Demikian Rencana Kerja dan Rencana Anggaran KPU tahun 2025 yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

Saya kembalikan pada Pimpinan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Terima kasih, Ketua, Saudara Ketua KPU RI.

Berikutnya, silakan Ketua Bawaslu RI.

KETUA BAWASLU RI (RAHMAT BAGJA, SH. LL. M):

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi,

Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi II,
Yang saya hormati Para Anggota Komisi II,
Ketua KPU beserta Anggota, serta Sekjen beserta jajaran,
Yang saya hormati Sekjen serta jajaran Bawaslu Republik Indonesia,**

Dapat kami sampaikan, Pak Ketua. Pertama adalah Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2023. Langsung saja.

Pagu Bawaslu, Bawaslu adalah Rp7.103.821.817.000,00 rupiah yang terdiri atas:

- Program dukungan manajemen sebesar Rp1.463.101.817.000,00. Yang terlihat di presentasinya:
 - 30,15% untuk operasional pegawai;
 - 46,09% untuk sub barang; dan
 - 23,76% non operasional barang.

Kemudian,

- Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi Rp5.640.720.000.000,00. Yang terdiri atas:
 - non tahapan Rp114.620.000.000,00; dan juga
 - tahapan pengawasan Pemilu Rp5.526.100.000.000,00 sebagai program prioritas nasional.

Automatic adjustment pada Tahun Anggaran 2023, terdiri atas dua tahap.

1. Tahap pertama Rp126.217.745.000,00. Sumber *automatic adjustment*:
 - belanja operasional yaitu uang kehormatan dan tunjangan kinerja (Tukin) pada gaji ke-13 dan THR;
 - belanja barang; dan
 - belanja modal. Kemudian,
2. *Automatic adjustment* tahap dua Rp40.374.614.000,00. Sumbernya, optimalisasi alokasi belanja pegawai dalam DIPA 2023.

Anggaran belanja tambahan Tahun Anggaran 2023, usulan anggaran belanja tambahan Bawaslu Rp5.375.384.380.000,00. Usulan disetujui oleh Kementerian Keuangan Rp2.805.149.263.000,00, yang terdiri atas:

- Lembaga pengawasan penyelenggaraan Pemilu oleh lembaga *ad hoc* satu triliun lima ratus lima puluh lima miliar tiga ratus dua puluh sembilan-

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Pimpinan, Pimpinan. Interupsi, Pimpinan.

Sama dengan apa yang saya sampaikan kepada KPU. *Alhamdulillah*, sudah disusul yang di KPU. Sudah lengkap.

Namun, dari Bawaslu kami hanya mendapatkan yang ini. Sehingga, kami bingung juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Sudah. Sekretariat sudah dikasih?

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Kami belum punya *nih*.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Nih, nih. Ini saja *nih*, yang dikasih *nih*. Punya ini *nih*. Pak Gaus, punya saya juga enggak apa-apa *nih*.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Enggak. Yang kawan-kawan, *nih*.

Kita ini kan tiap tahun melakukan kegiatan ini kan. Jadi, enggak perlu dikoreksi lagi. Dan saya minta untuk seluruh Anggota Komisi diberikan supaya bisa ditelaah, dipelajari, dan diberikan masukan dan saran, Pimpinan.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Sebenarnya di bahan yang ini ada lengkap semua. Yang ini kan PPT, ya, untuk, untuk memudahkan presentasi saja sebenarnya.

Tapi, baiknya memang supaya bisa mengikuti presentasi-

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Paling tidak apa yang dibacakan itu yang diserahkan kepada kita.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Lanjut.

KETUA BAWASLU RI (RAHMAT BAGJA, SH. LL. M.):

Terima kasih.

Dilanjutkan.

Kemudian,

- Pengawasan masa kampanye Pemilu Rp1.017.973.343.000,00;
- Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Rp12.864.325.000,00;
- Pengawasan logistik Rp218.982.555.000,00.

Realisasi anggaran Bawaslu Tahun Anggaran 2023:

- Pagu Tahun Anggaran 2023, Rp9.943.019.229.000,00;
- Realisasi anggaran Rp8.586.440.489.567,00;

- Persentase realisasi 86,36%;
- Sisa anggaran Rp1.356.578.639.433,00.

Realisasi anggaran Bawaslu berdasarkan program dan jenis belanja.
Berdasarkan program:

1. Program dukungan manajemen:
 - Pagu anggaran, Rp1.507.934.710.000,00;
 - Realisasi anggaran, Rp1.353.628.142.366,00;
 - Sisa anggaran, Rp154.306.567.334.634,00;
 - Persentasenya, 89,77%.
2. Program penyelenggaraan Pemilu dan proses konsolidasi demokrasi:
 - Rp8.435.084.419.000,00;
 - Realisasi anggaran, Rp7.232.812.347.201,00. realisasi anggaran;
 - Sisa anggaran, Rp1.202.272.071.799,00.

Sisa anggaran keseluruhan, Rp1.356.578.639.433,00.

1. Belanja pegawai:
 - Pagu anggaran, Rp542.601.024.000,00;
 - Realisasi anggaran, Rp508.078.436.092,00;
 - Sisa anggaran, Rp34.522.587.908,00;
 - Realisasi anggaran, 93,64%.
2. Belanja barang:
 - Pagu anggaran, Rp9.292.682.439.000,00
 - Realisasi anggaran, Rp7.977.134.446.503,00;
 - Sisa anggaran, Rp 1.315.547.992.497,00;
 - Realisasi anggaran, 85,84%.
3. Belanja modal:
 - Pagu anggaran, seratus tujuh triliun tujuh ratus tiga puluh lima, 107 miliar, mohon maaf, Rp107.735.666.000,00;
 - Realisasi anggaran, Rp101.227.606.972,00;
 - Sisa anggaran, Rp6.508.059.028,00;
 - Realisasi anggaran persentasenya, 93,96%.

Persiapan pengawasan Pemilu pada Tahun Anggaran 2023, terdiri atas:

- Peluncuran aplikasi Jarimawas Pemilu;
- Siaga pengawasan satu tahun; kemudian
- Rakornas pencegahan dan juga pelantikan sampai dengan kerja sama dengan Kementerian stakeholder untuk persiapan Pemilu tahun 2024.

Penghargaan untuk Bawaslu:

- Meraih predikat WTP ke-8 berturut-turut;
- Bawaslu meraih Penghargaan Pelayanan Informasi Publik Ramah Disabilitas;

- Bawaslu memperoleh Penghargaan Tata Kelola Pengadaan Terbaik Ketiga; kemudian
- Bawaslu meraih penghargaan JDIH Terbaik tahun 2002;
- Terbaik Kedua tahun 2023.

Hal-hal yang mempengaruhi realisasi.

- SDM.
Terbatasnya jumlah SDM personal Sekretariat Bawaslu, terutama pada kekurangan jumlah pegawai administrasi dan teknis. Sehingga, menyebabkan banyak pelaksanaan kegiatan belum terserap secara maksimal.
- Anggaran belanja tambahan.
Sejak awal tahun 2023, tetapi anggaran belanja tambahan diberikan menjelang triwulan terakhir tahun 2023 dan banyak tahapan yang sudah lewat dan tidak bisa terserap dengan baik.
- Proses pencairan.
Proses pencairan anggaran Bawaslu kabupaten/kota non satker masih terpusat di Bawaslu provinsi. Sehingga, seluruh pertanggungjawaban keuangan hanya dapat dilakukan oleh Bawaslu provinsi sehingga memerlukan alur yang panjang.

Pagu alokasi anggaran Bawaslu Tahun Anggaran 2024. Pagu Bawaslu adalah Rp11.611.620.116.000,00. Yang terdiri atas:

- Program dukungan manajemen; dan
- Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi.

Dalam program dukungan manajemen, anggarannya Rp1.399.142.340.000,00. Terdiri atas:

- 39,97% untuk belanja pegawai, Rp559.289.473.000,00;
- 45,27% operasional barang, Rp633.364.482.000,00; dan juga
- 14,76% untuk non operasional barang, Rp206.488.385.000,00.

Kemudian, program penyelenggaraan Pemilu dan dalam proses konsolidasi demokrasi Rp10.212.477.776.000,00:

- Non tahapan terdiri atas 4,88%, Rp469.794.830.000,00; kemudian
- 95,12% tahapan pengawasan Pemilu, Rp9.742.682.946.000,00 sebagai program prioritas nasional.

Kemudian, *automatic adjustment* pada Bawaslu. Pagu anggaran, pagu APBN Tahun 2024 sebesar Rp46.988.287.000,00.

Anggaran Bawaslu Tahun Anggaran 2023:

- Pagu, Rp11.611.620.116.000,00;
- Terealisasi, Rp5.832.103.838.416,00;
- Realisasinya, 50,23%;
- Sisa anggaran, Rp5.779.516.277.584,00.

Realisasi program anggaran Bawaslu berdasarkan program dan jenis belanja. Berdasarkan program:

1. Program dukungan manajemen:
 - Pagunya Rp1.399.142.340.000,00;
 - Realisasi anggaran Rp491.485.999.780,00;
 - 35%;
 - Sisa anggaran, Rp907.656.340.220,00.
2. Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi:
 - Pagu anggaran, Rp10.212.477.776.000,00;
 - Realisasi anggaran, Rp5.340.617.836.636,00;
 - Realisasi 52,23%;
 - Rp4.871.859.937.364,00.

Total sisa anggaran Rp5.779.516.277.584,00, yang terdiri atas:

1. Belanja pegawai:
 - Pagu anggaran, Rp559.289.473.000,00;
 - Realisasi anggaran, Rp256.338.874.394,00;
 - Sisa anggaran, Rp302.950.598.606,00;
 - 45,83%.
2. Belanja barang:
 - Pagu anggaran, Rp10.869.324.711.000,00;
 - Realisasi anggaran Rp5.545.481.680.551,00;
 - Sisa anggaran, Rp5.323.843.030.449,00;
 - 51,02%.
3. Belanja modal:
 - Pagu anggaran, Rp183.005.932.000,00;
 - Realisasi anggaran Rp30.283.283.471,00;
 - Sisa anggaran Rp152.722.648.529,00;
 - 7,42%.

Untuk realisasi anggaran Bawaslu khusus prioritas nasional untuk pengawasan Pemilu tahun 2004, Tahun Anggaran 2024:

- Pagu:
 - Untuk barang, jenis belanja, Rp8.392.369.234.000,00;
 - Modal Rp42.715.185.000,00;
 - Total Rp8.435.084.419.000,00.
- Realisasi anggaran:
 - Untuk realisasi barang, Rp7.191.411.727.700,00;
 - Modal Rp41.400.619.501,00;
 - Total Rp7.232.812.347.201,00;

Realisasi 85,69%, modal 96,92%, total 85,74.

Grand total untuk tahun 2002, 2023, dan 2024:

- Pagu. Rp18.530.977.070.000,00;
- Realisasi. Rp15.568.053.334.040,00;
- Persentasenya. 86,23%.

Untuk Pagu Indikatif Bawaslu Tahun Anggaran 2025. Pagu indikatif Bawaslu Rp2.416.945.124.000,00.

1. Program dukungan manajemen Rp2.288.345.458.000,00 terdiri atas:
 - Operasional 37%, Rp854.082.591.000,00;
 - 43% operasional 002, Rp987.780.033.000,00;
 - non operasional 20%, Rp446.480.834.000,00.
2. Program penyelesaian Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi Rp128.599.666.000,00:
 - Non operasional 68,80%, Rp 88.480.000.000,00;
 - 31,2% program prioritas nasional, Rp40.119.666.000,00.

Program prioritas nasional Bawaslu terdiri atas:

- Pengawasan daftar pemilih berkelanjutan Rp23.120.000.000,00;
- Pusat pendidikan Pemilu partisipatif Rp5.000.000.000,00;
- Pengembangan pusat pendidikan Pemilu partisipatif 9.500.000.000,00; kemudian
- Penguatan dan integrasi sistem informasi pengawas Pemilu Rp2.499.666.000,00.

Program prioritas nasional ini:

- a. Berdasarkan kesepakatan dalam forum trilateral *meeting* antara Bawaslu, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan;
- b. Persiapan pengawasan Pemilu dan pemilihan tahun 2029. Sehingga, pada saat tahapan awal diselenggarakan Bawaslu telah siap baik dari segi aspek data daftar pemilih potensial, maupun dari aspek sarana dan prasarana internal yang berbasis elektronik sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu, Bawaslu juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan Pemilu dan pemilihan sebagai satu wujud mendukung demokrasi yang jujur dan adil yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Demikian.

Pimpinan Komisi II yang kami hormati beserta Anggota Komisi II,

Apa yang kami dapat sampaikan sebagai pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025, rencana kerja pemerintah tahun 2025, dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan 2024.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Terima kasih, Saudara Ketua Bawaslu RI.

Sebelum ke anggota, kita perpanjang, ya, sampai jam 11.30 soalnya masih ada mitra berikutnya.

(RAPAT: SETUJU)

Silakan. Ada yang ini?

Pak Guspari, Pak Riswan Tony, Kamran. Wahyu, keempat.

Silakan, Pak Guspari

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan anggota Komisi II yang saya hormati,
Ketua KPU beserta komisioner yang hadir beserta Sekjen,
Ketua Bawaslu hanya satu-satunya hadir beserta Sekjen, Staf-staf,
Hadirin dan Hadirat yang berbahagia,**

Pertama, saya menyikapi dulu tentang keseriusan KPU dan Bawaslu dalam menyikapi RDP kita pada hari ini. RDP ini adalah rapat tentang pembahasan anggaran. Ini adalah tahun kelima bagi kami, terutama saya bermitra dengan KPU dan Bawaslu. Baru pada hari inilah saya lihat baik KPU ataupun Bawaslu menampakkan ketidakseriusannya dalam menghadapi RDP ini.

Hal itu saya perhatikan dari jumlah yang hadir. KPU ini adalah Ketua bukan kepala. Sifatnya adalah kolektif kolegial. Persoalan, persoalan berkaitan tentang pertanggungjawaban keuangan itu tidak hanya bisa ditumpahkan kepada ketua saja. Berbeda dengan kepala. Oleh karena itu, saya lihat dari tujuh komisioner KPU, yang hadir cuma tiga orang.

Jangan kita beranggapan bahwa setelah selesai Pemilu, pertanggungjawaban keuangan tetap merupakan sesuatu yang amat-amat penting. Tentu saya tidak berharap mitra saya ini seperti kondisinya pada hari ini. Terkesan seolah-olah, dalam tanda kutip, KPU dan Bawaslu dalam rapat hari ini menyepelkan RDP yang berkaitan terhadap pembahasan dan evaluasi anggaran. Ini catatan penting yang ingin saya sampaikan.

Yang kedua juga lebih tragis lagi adalah Bawaslu hanya satu-satunya Ketua yang hadir. Ini *memiriskan* ini. Janganlah. Kita ini harus saling menghargailah. Kita ini rapat secara terbuka. Kami coba lihat jarang-jarang yang hadir seperti ini. Tapi, karena memang dirasakan pentingnya kegiatan ini, saya lihat, kita tidak melakukan skor terhadap rapat karena sudah memenuhi kuorum.

Ini, Pak Bagja, tolong bagaimana *nih* anggotanya. Harusnya kan ada *schedule* kegiatan yang sudah lama kami kirimkan. Kegiatan-kegiatan lain itu bisa di-*cancel*. Ini adalah penting dan jarang-jarang kita melakukan rapat antara mitra dengan Komisi II ini.

Apalagi, kertas kerja yang semacam ini. Anggarannya sangat luar biasa. 11 triliun. Laporan yang disampaikan ini sulit saya untuk membacanya. Masa begini *nih* laporannya. Dan itu pun kami minta. Coba lihat, bagaimana ini? Kemudian, fotokopi, apa, SK atau apa ini, saya enggak mengerti. Enggak bisa saya baca *nih* yang kecil ini. Padahal kertasnya bagus, kecil. Kenapa tidak seperti yang biasa saja? Barangkali lebih murah.

Artinya yang ingin saya sampaikan, profesionallah dalam menyikapi apa yang kita sedang bahas pada hari ini. Ini masalah teknis tentang keberlangsungan rapat.

Lalu, saya masuk kepada materi. Barangkali nanti akan didalami dalam, seperti biasa kita lakukan, ada konsinyering. Kemudian, ada pleno dalam memutuskan anggaran yang sedang kita bahas ini.

Pertama adalah kepada KPU. Saya tidak mendapatkan halamannya, yaitu tentang evaluasi pelaksanaan anggaran 2023. Tentu, pertama saya memberikan apresiasi kepada KPU yang tadi menyampaikan penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh berbagai institusi kepada KPU terhadap kinerja yang dilakukan.

Tentu saya berharap, bagaimana ke depan selalu secara terus-menerus upaya-upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap kinerja yang diperoleh itu.

Yang ingin saya sampaikan adalah realisasi anggaran untuk KPU Pusat hanya 95,40%, sedangkan KPU Provinsi 91,43%. Sudah ketemu, Pak Hasyim? Kemudian, kabupaten/kota 97,69%. Kalau saya melihatnya berbanding terbalik.

Kabupaten/kota itu jumlahnya 514, ya Pak Sekjen? Artinya, pertanggungjawaban keuangan itu dikumpulkan/dikompilasi. Jumlahnya sekian menjadi rata-rata 96,88%. Ini saya memberikan apresiasi yang luar biasa. 514 kabupaten/kota, capaian anggaran realisasinya itu bisa memperoleh angka paling tinggi dibandingkan provinsi dan pusat.

Sebetulnya, menurut hemat saya, pusat sebetulnya lebih elegan dalam merealisasikan anggaran itu karena terpusat satu komando. Kalau ini komandonya adalah 514. Yang saya kritisi adalah pertama, provinsi malah lebih tinggi kabupaten/kota ketimbang provinsi ini berbanding terbalik begitu. Apalagi, pusat. Di mana persoalan yang menyebabkan persoalan ini sampai sedemikian rupa.

Harusnya pusat sama dengan kementerian/lembaga yang kami mitra di dalamnya ini. Kalau ATR/BPN, itu berat. Kenapa? Ada Kakan kabupaten/kota,

ada Kanwil, ada pusat. Ada juga mitra kami yang sifatnya hanya pusat saja. Uang itu dikendalikan hanya pusat, tidak didistribusikan ke daerah. tentu manajemennya lebih berat mempertanggungjawabkannya karena harus dikompilasi.

Nah, yang saya tanyakan adalah kenapa ini malah berbanding terbalik? KPU hanya, KPU Pusat RI mempunyai 95,40%, provinsi 91,43%. Malah saya memberikan apresiasi kepada kabupaten/kota, bisa capaiannya itu mencapai 97,69%. Harusnya berbanding terbalik. Pertama.

Yang kedua adalah evaluasi pelaksanaan anggaran 2024. Ini bagaimana caranya karena enggak ada nomor? Evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024. Yang tadi itu 2023 karena sudah berlalu. Saya minta penjelasannya kenapa seperti itu yang tadi itu, Pak Sekjen, ya.

Pusat 95, provinsi 91, kabupaten/kota 97. Harusnya terbalik karena, apa, kompila, dari berbagai kabupaten/kota. Paham ya, Pak Sekjen, ya?

Berikutnya adalah evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024. KPU Pusat sama juga dengan apa yang saya sampaikan, pembahasan seperti yang tadi. Jadi, saya tidak akan ulas.

KPU Pusat baru 15,47%, provinsi baru 47,94%, kabupaten/kota sudah mencapai 89,15%. Apa persoalannya ini? Kenapa tidak berbanding lurus, sehingga capaian itu harusnya pusat malah lebih *go*, lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota sebagaimana pada pembahasan yang sebelumnya.

Kemudian, yang berikutnya adalah saya ingin menyampaikan anggaran 2025. Tadi sudah disampaikan bahwa jumlahnya tiga koma sekian T. Dan yang ingin saya sampaikan adalah adanya pemilihan di, halaman berapa? Enggak ada halamannya *nih*. Rencana Kerja KPU tahun 2025, hal poin 6. Pemilihan pada empat daerah otonomi baru, itu anggarannya adalah 100 miliar. Apakah masih ada pemilihan yang dilakukan setelah pemilihan di luar dari apa yang kita rencanakan ini?

Karena dibuat di sini anggarannya spesial, saya ingin tahu pemilihan pada empat daerah otonomi baru ini yang dimaksudkan itu bagaimana? Apakah terpisah pemilihan itu dengan kabupaten/kota dan provinsi atau karena KPU belum memasukkan? Karena saya sudah bisa memahami, sudah bisa menangkap. Karena kabupaten, kalau provinsinya itu baru, dia belum punya anggaran dari APBD-nya. *Oke*.

Dan bagaimana dengan kabupaten/kota? *Nah*, tolong dijelaskan kan ini. Saya sudah punya sudah punya pemahaman tentang terhadap hal itu. Cuma tolong juga dijelaskan bahwa yang dimaksudkan ini hanya untuk empat provinsi dan tidak termasuk di dalamnya kabupaten/kota. Karena kabupaten/kota sudah ada APBD-nya, sehingga ada dana hibah yang diberikan oleh kepala daerah kepada KPU yang bersangkutan.

Kemudian, kepada Bawaslu. Bawaslu, aduh, saya sangat memprihatinkan realisasi anggaran. Padahal KPU, Bawaslu meminta tambahan anggaran kepada Pemerintah. Anggaran yang diminta itu adalah anggaran 2023 itu jumlahnya adalah 9,9T. Terealisasi hanya 8,5T. Sisanya, saya catat ini, sisanya adalah 1,380T. Tidak sedikit.

Temannya kami, mitra-mitra kami kementerian dan lembaga yang ada di Komisi II ini, kami mitranya ada sekitar 16. Rata-rata kementerian dan lembaga, kecuali Kementerian Dalam Negeri dan ATR/BPN, itu hanya sekitar 300 juta, 300 miliar, 200 miliar, 400 miliar, 150 miliar. Ini sisa anggarannya 1,380T.

Artinya, yang saya lihat di sini adalah, pertama, malah meminta tambahan anggaran. Ini anggaran pertamanya itu diminta adalah apa yang direalisasikan *tuh*, yang dikabulkan itu adalah 7T. Lalu diminta tambahan sehingga menjadi 11T, eh, sehingga menjadi 9T. Oleh karena itu, tentu saya ingin juga mempertanyakan jumlah realisasi anggarannya cuma 86,33.

Menurut hemat saya, saya akan prediksi karena ini adalah RDP pertama pembahasan anggaran. Baru yang pertama ini KPU dan Bawaslu. Dan akan berikutnya sampai beberapa hari kemudian. Saya kira yang paling *jeblog* ini adalah KPU. Karena, biasanya mitra-mitra kami ini capai anggarannya di atas 90. Ini 86. Anggarannya besar, sehingga sisa anggarannya 1,380. Padahal mitra kami yang lain menjerit-jerit, menangis-nangis, untuk bagaimana dilakukan penambahan anggaran. Di satu sisi, Bawaslu kondisinya seperti yang saya sampaikan tadi.

Kemudian, realisasi anggaran 2024. Memang masih dalam perjalanan. Sekarang adalah bulan Juni. Anggarannya adalah 5,8, capaiannya baru sekitar 50. Tentu saya *me-warning* kepada dua institusi, KPU dan Bawaslu bagaimana capaian anggaran ini betul-betul bisa dilakukan secara profesional.

Tentu kita harapkan perencanaan harus sesuatu yang rasional. Jangan dibuat, perencanaan dibuat kecil, capainya besar. Sehingga, bisa mencapai 120%. Itu adalah sesuatu yang menurut hemat saya adalah tidak rasional. Itu adalah akal-akalan. Oleh karena itu, saya berharap perencanaan ini harus dilakukan secara profesional. Bagaimana prediksi-prediksi itu bisa dilakukan secara baik.

Terakhir adalah ini aspirasi ini. Saya tadi menelepon ke Komisi IX. Ini dari Bapak-Bapak, *nih*. Mitra Komisi IX, dari yang saya sampaikan tadi, pengalaman kami ketika melakukan sosialisasi, *naudzubillah*, terutama Bawaslu yang saya lihat ini, *keteter*. Sehingga, di-*backup* dulu oleh kawan-kawan anggaran sosialisasi itu. Mengemis, TA-TA kami meminta duit. Padahal bukan bukan, bukan untuk kami. Uangnya sudah diserahkan kepada masyarakat. Sosialisasi kita. *Nih*, anggarannya kan sudah yang saya sampaikan tadi Komisi IX.

Sosialisasi itu, maaf, di satu Kementerian 80 kali, 70 kali. Paling kecil adalah 40 kali. Kepada siapa saya bertanya tadi, Pak Kamto, mantan Anggota Komisi II. Saya sengaja tanyakan itu, Ketua.

Yang ingin saya sampaikan adalah agar soal sosialisasi ini tolonglah juga diberikan kesempatan kepada kawan-kawan. Jangan hanya, tadi saya lihat laporan dari TA dengan Bawaslu, baru tiga diproyeksikan. Saya harap kepada KPU Sekjen dan Sekjen Bawaslu, mohon dilakukanlah manajemen secara transparan, akuntabel, manajemen yang modern. Jangan sampai *keteter* kawan-kawan kami dalam melakukan sosialisasi itu.

Oleh karena itu, karena ini adalah merupakan akhir dari anggaran dan juga kami-kami di Komisi II ini, ada yang terpilih ada yang tidak. Mohon nanti sosialisasi itu ditingkatkan dibandingkan pada periode tahun 2023.

Barangkali demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.SI., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Terima kasih, Pak Guspari Gaus.

Silakan, Riswan Tony.

F-P.GOLKAR (Drs. H. RISWAN TONY, DK):

Terima kasih, Ketua

**Teman-teman Komisi II,
Ketua KPU,
Sekjen juga,
Ketua Bawaslu,
Pak Sekjen beserta jajarannya yang saya hormati,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini adalah kita bicara Pagu indikatif ya, Pak. Pertama, mengulas dulu Pak Ketua tentang pertemuan kita yang lampau. Bahwasanya kita sudah sepakat di dalam. Sebelum kita bahas Anggaran 2025, kita semestinya membahas Realisasi Anggaran 2024. Bukan bicara persentase-persentase, tapi kita mau anggaran itu spesifik, ya. Katakanlah satuan tiga sampai mana sih? Begitu.

Jadi, Ketua KPU, Ketua Bawaslu kita mau tahu saja. Kalau memang ini *real*, enggak ada masalah. Kita juga memberikan apresiasi, ya. Tapi kalau umpamanya ada penyimpangan, misalnya sekarang kan ada beberapa *rumors*

tentang kelebihan perjalanan dinas. Lalu, kita ulangi lagi pemakaian transportasi yang tidak lazim. *Nah*, kalau memang ada di dalam satuan tiga dan itu nomenklturnya juga memang sudah ada, ya enggak ada masalah buat kita. tapi, laporan ini tetap harus kita jalankan, Ketua, karena ini kan sudah kesepakatan kita.

Lalu yang kedua, terhadap 2025. Itu pun buat saya, 3 triliun di KPU dan 2,4 triliun di Bawaslu, yang menjadi pertanyaan besar juga buat saya. Begitu selesai bawa, eh, Pilkada 27 November 2024 apakah masih ada kerjaan tadi tentang ada logistik dan sebagainya tadi, pelaksanaan di yang dibebankan oleh ketua KPU tadi?

Kalau memang ini ada, tentunya untuk sekali ini, Ketua, saya mohon sekali, pembahasan nanti kalau apakah itu nanti konsinyering atau tidak, ya harus dijabarkan juga. 3 triliun ini dan 2,4 ini benar-benar *real*. Satuan tiga. Jadi, jangan lagi bicara persentase-persentase. Itu kan bisa diatur semua pak kalau bicara persentase.

Capaian-capaian, apalagi tadi ISO-nya banyak sekali ya, saya maklumlah itu. Tapi, kalau didukung oleh data yang benar-benar, satuan tiga realisasinya benar-benar. Apalagi banyak juga rumor-rumor pindah nomenklatur dan sebagainya. Itu kan enggak bisa, Pak. Kalau kita bicara logistik, ya logistik. Tidak bisa dimasukkan ke dalam transportasi. Kan semuanya ada di dalam nomenklturnya.

Nah, ini Ketua. Kita minta khusus. Jadi, sebelum kita mengiyakan 3 dan koma, atau 2,4 triliun ini, ya kita tahu dulu isinya apa. Begitu. Jangan-jangan dari pagu indikatif ini, Pak Menteri atau Ibu Menteri Keuangan juga tidak membahas secara detail.

Karena seperti yang kita ketahui, setelah 2024 tanggal 27 November ini, kegiatan pemilihan kan enggak ada lagi, Pak. Apa iya ada penyuluhan dan sebagainya? Lalu, ada tadi juga beberapa kegiatan undang-undang dan sebagainya yang, yang ditampilkan itu. Ya, menurut saya, enggak, kaya basa-basi begitu. Karena bicara angka 3 triliun, tapi realisasi atau yang ditampilkan tadi. Acara-acaranya itu 3 miliar, 5 miliarlah. Itu mencapai 3 triliun itu berapa ribu kegiatan itu? Tapi, itu cuma 3-4 triliun, eh, 3-4 kegiatan saja di dalam buku yang atau lampiran itu tadi.

Jadi, sekali ini jang, saya minta benar, Ketua, kita, keseriusan kita. Yang dikatakan oleh Pak Gaus tadi, kita mesti serius. Ya, harus serius sekali. Jadi, bahasnya juga jangan tolong, Ketua, kita bahas, apa, anggaran kok *space* waktunya cuma 1 jam. Begitu, Kenapa enggak 24 jam? Begitu, Pak. Atau 20, 24x2 begitu. Itu kan jadi tuntas, Pak.

Jadi, saya juga sebenarnya terkaget-kaget juga. Ini kok bahas angka besar cuma 1 jam. Begitu. Akibatnya, yang jam 11 sudah *nunggu*. *Nah*, jadi minta ke depan ini untuk pembahasan serius.

Pertama adalah saya minta karena sudah, kita sudah sepakat mengenai realisasi '24. 2024, Pak Sekjen. Jadi, kita minta benar-benar satuan tiganya. Kalau memang ada, apa, *real*, ya, enggak ada masalah. Begitu. Tapi, kalau tidak berani, ya, berarti ada masalah.

Ya. Setuju Ketua, ya, untuk itu

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Terima kasih, Pak Riswan Tony.

Ini perlu saya sampaikan juga. Ini kan baru penyampaian Pagu indikatif. Nanti kita akan ada pembahasan yang mendalam, yaitu setelah tanggal 16 Agustus, ya. Itu biasanya dengan konsinyering dan sebagainya.

Dan tadi yang disampaikan Pak Riswan Tony, termasuk laporan dan evaluasi, kita juga sudah akan meminta terkait dengan satuan tiganya. Jadi, nanti bisa kita bahas secara apa mendalam dan waktunya enggak dibatasi.

Silakan, Pak Kamran

F-P.NASDEM (KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan, dan
KPU,
Bawaslu yang saya hormati**

Tidak banyak ini, Ketua.

Pertama, terkait dengan realisasi anggaran tahun 2024 untuk KPU. Memang, Pak Gaus, saya membacanya sedikit berbeda kita ini. Kalau lihat realisasikan KPU ini 15%, 15,47. Tetapi, sesungguhnya kalau saya melihat. Ini kan karena sifatnya fasilitasi ini, jadi tentu dia harus merencanakan sampai satuan tiga. Tapi bahwa berapa persoalan dan berapa yang harus direalisasikan, memang sedikit berbeda.

Nah, tetapi, di beberapa pertemuan kemarin saya bicara nilai demokrasi. Saya lebih kepada sumber dayanya dengan pagu sebesar ini. Kemudian, anggaran sebesar ini mestinya kita sudah bergerak pada nilai-nilai demokrasi dan demokrasi ini bisa kita wujudkan jika sumber dayanya baik. Ini, kedua.

Kedua-duanya, baik Bawaslu ataupun KPU-nya. Jangan lagi kita menghadapi soal-soal yang lebih kepada sesuatu yang dimasukkan itu hal yang paling mendasar, tetapi sumber dayanya minimal. Ini yang tidak kita tidak ingin ini terjadi periode yang akan datang, khususnya Pilkada. karena, Pilkada ini kan banyak ini 5014 tambah 238. *Nah*, persoalannya akan banyak.

Nah, oleh sebab itu, terkait dengan sumber daya ini. Karena kita kan tidak bicara *output* ini, kita bicara *outcome*. Kita bicara nilai. Sehingga, sumber daya ini kemudian menjadi luar biasa penting, menurut kami. sehingga ,pendidikan bimbingan-bimbingan terhadap pelaksana di tingkatan bawah, terutama yang *ad hoc*, itu menjadi hal yang urgen, Ketua. Jangan lagi kita mendapatkan keluhan-keluhan yang sifatnya remeh-temeh. Anggarannya kita besarkan, tetapi hasilnya tidak sebagaimana yang kita harapkan. Ini terkait dengan, apa namanya, penyerapan anggaran.

Kemudian, memang secara total ini serapannya 73,78. Ini cukup. Cukup. Harusnya ini di atas 90, Ketua. *Nih*, mohon diperhatikan. Di mana sebenarnya soal yang paling inti, jangan sampai terkait dengan kualitas pelaksanaan kemudian anggarannya ada, tapi tidak terserap. Itu.

Kemudian, dari Bawaslu. Lagi-lagi ya, saya ingin benar-benar sumber dayanya harus ditambah memang, Pimpinan. Di lapangan, di TPS, itu Bawaslunya cuma satu. Tidak berbanding lurus dengan KPU. KPU itu tujuh KPPS-nya kalau tidak salah, di setiap TPS-nya. Bawaslunya satu. Sementara, kita mengharapkan, apa namanya, hasil yang baik. Kita mengharapkan hasil yang berkualitas, tetapi antara yang diawasi dan pengawas itu jauh berbeda.

Nah, ini tentu alasannya apa? Karena dukungan anggaran atau apa? *Nah*, kalau memang dukungan anggaran, yang harus kita ubah anggarannya. Yang penting pengawasan di tingkat TPS itu benar-benar optimal. Sehingga, sesuai dengan yang kita harapkan. Kita mengharapkan hasil yang baik tetapi pelaksana di bawah kualitasnya bermasalah, jumlahnya pun bermasalah.

Mungkin itu saja, Ketua.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Terima kasih, Pak Kamran.

Silakan, Pak Wahyu.

F-P.DEMOKRAT (WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.):

Terima kasih, Ketua.

Saya ingin menambahkan sedikit saja. Tadi mungkin maksud Pak Riswan Tony itu mengingatkan. Kan berdasarkan amanat undang-undang, 30 hari setelah pembahasan mitra kerja kita ini wajib menyerahkan satuan tiga. *Nah*, ternyata permasalahannya, apakah dari sekretariat Komisi yang belum menyerahkan ke anggota atau memang dari mitra kerja kita ini belum pernah menyerahkan? *Nah*, itu mereka mengingatkan.

Kalau saya jujur saja, Ketua, *alhamdulillah*, empat tahun belum pernah terima. Iya. Saya termasuk orang yang setia dengan Komisi II semenjak perempatan tidak pernah *tour of duty* ke komisi-komisi yang lain. Begitu sayangnya partai saya dengan saya, sehingga saya tetap diletakkan di Komisi II. *Nah*, permasalahannya, apakah Komisi II itu akan tetap membiarkan atau kita ini memberikan teguran atau sanksi atau belaian kasih sayang? Itu mungkin ditanyakan oleh Pak Riswan Tony. Itu yang pertama.

Kemudian, yang kedua. Karena kan kita ini rapat konsinyering masih lama, Ketua. Saya ini mengingatkan dengan mitra kerja kita. Pertama, mengubah mata anggaran tanpa persetujuan mitra kerja komisi, itu dosanya besar, Pak. Ada sanksi pidananya.

Nah, mungkin dalam hal ini saya lihat di sini ada Sekjen KPU hadir. Bapak sebagai profesional bertugas melakukan pengawalan terhadap mata anggaran yang ada di kelembagaan, Bapak. Karena kalau komisioner yang dilantik itu enggak profesional mengelola masalah keuangan ini, Pak. Itulah tugas utama dari sekretariat jenderal. Ada perubahan mata anggaran, dosa, Pak. Seingat saya, evaluasi di panitia *ad hoc* itu tidak ada mata anggaran. Bagaimana cara Bapak melaksanakan evaluasi itu? Se-Indonesia.

Nah, coba Bapak siapkan dulu, Pak. *Anu*, mungkin kan Bapak ada kesempatan dua minggu untuk mengarang, Pak. Ya kan ada kesempatan dua minggu untuk mengarang. Bagaimana kira-kira membenarkan apa yang sudah Bapak lakukan?

Karena saya memahami, Pak. Penyelenggara Pemilu ini paling patuh dan taat itu, Pak Saan, cuma satu pasal. Berjenjang, ya. Masalahnya, kalau perhitungan berjenjang itu enggak masalah, Pak Saan, Pak Ketua. Tapi, kalau setoran berjenjang, *nah* itu yang jadi masalah.

Kami, Pak, dari Komisi II ini berjuang untuk menaikkan alokasi anggaran di mitra kerja kami, terutama di panitia *ad hoc*. Tujuannya mulia, supaya orang ini senang, bahagia, tidak ada yang sakit. Tetapi, kalau dampaknya itu adalah akhirnya adalah setoran berjenjang. Wah, itu berarti kami ikut sama-sama mengaminkan masuk neraka. *Nah*, bahkan itu pun akhirnya Bapak aminkan dengan evaluasi.

Nah, Bapak punya kesempatan dua minggu. Enggak usah dijawab, Ketua, ini. Enggak sempat. Dua minggu, Pak, untuk proses mengarang, ya.

Itu kira-kira seperti itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Mudah-mudahan tidak salah. Nanti tolong dijawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Terima kasih, Pak Wahyu

Silakan. Terakhir siapa? Bu Rezka.

F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi II,
Selanjutnya para Mitra KPU dan Bawaslu,**

Mendalami lagi dari yang tadi disampaikan oleh Pak Gaus, juga tanda tanya bagi kami. Mohon nanti juga disampaikan mana komisioner yang lain, baik KPU dan Bawaslu. Atau mungkin sudah tidak perlu kita lagi, Pak Gaus, sudah bisa memutuskan sendiri.

Yang kedua, penghargaan-penghargaan itu yang Bapak-Bapak sampaikan tadi bagus. Tapi, itu bonus Pak. Yang lebih penting adalah kinerja dari lembaga Bapak. Jangan hanya bangga dengan mendapatkan penghargaan ini itu ini itu.

Saya menarik membaca evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dari KPU. 076 CQ, terkait dengan program penyelenggaraan pemilu. Ada poin sarana dan prasarana sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), 278 miliar. Anggaran ini sangat besar, Pimpinan. Apakah Sirekap di dalam ini? Dan Sirekap bisa kita sampaikan tidak berhasil. Hanya berhasil membuat PHP, menyampaikan data-datanya yang sangat berbeda. Membuat opini di masyarakat. Tapi, anggarannya sangat luar biasa 278 miliar.

Berikut. Ada data penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Penyusunannya, pelaksanaan proses penyusunan jumlah kursi ini menghabiskan 46, 45 miliar. Dan di bawahnya ada evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan sebanyak Rp23 miliar. Luar biasa, Pimpinan. Anggaran evaluasi lebih dari setengah anggaran pelaksanaan. Lebih besarlah, 50%. Anggaran yang besar, padahal Dapil tidak banyak yang berubah kecuali tambahan pengaturan untuk daerah otonomi baru. *Nah*, ini saya minta dijawab dulu nanti ini.

Berikut. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif anggarannya 211 miliar. Evaluasi Rp36 miliar. *Nah*, ini evaluasi hanya sekitar 16%. Coba dibandingkan dengan poin tadi di angka 4. *Nah*, Pak Sekjen atau Ketua dan jajaran, nanti bisa dijelaskan ini.

Lanjut, terkait dengan data pemilih. Ini tidak ada biaya evaluasi. Apa enggak perlu ada evaluasinya? Saya enggak *ngerti* ini. Coba nanti tolong dijelaskan karena saya enggak *ngerti* ini, Pak Sekjen atau Ketua.

Tambah lagi, terkait dengan poin 9. Masa kampanye Pemilu, pelaksanaan 101 miliar. Evaluasinya 285 juta. Sangat kecil dibanding evaluasi pada kegiatan yang lainnya. Bisa irit di sini, Pak Sekjen.

Nah, kita lihat lagi. 076 WA, ada operasional perkantoran dan dukungan sarana dan prasarana. Layanan perkantoran, Rp297 miliar. Sarana prasarana sebanyak Rp123 miliar. Jumlahnya yang sangat besar ini melebihi anggaran untuk kegiatan di masing-masing tahapan, kecuali sosialisasi, logistik, honor. *Nah*, ini mungkin nanti bisa dijelaskan dulu.

Menambah dari yang disampaikan oleh Pak Riswan Tony. ini memang hal yang sangat penting, Pimpinan. Harus kita tindak lanjuti juga. Terima kasih tadi, Pimpinan sudah memberikan kata pengantarnya untuk kita tindak lanjut ke depan.

Tapi, memang dua minggu ini lama untuk bisa kita teruskan lagi ke depannya. Apalagi nanti di bulan Agustus, walaupun konsinyering dilakukan. Sementara evaluasi kemarin dari jawaban yang sudah dibuat tertulis oleh KPU dan Bawaslu, semua normatif. Belum bisa dijawab termasuk pertanyaan saya. Yang saya pertanyakan, terkait mobil dinas dan rumah, itu juga termasuk di dalam anggaran.

Jadi, kalau ada terkait pemborosan anggaran, *ngapain* lagi kita tambahkan di anggaran untuk 2025 ini? Kalau perlu KPU ini enggak perlu dikasih anggaran lagi. Sudah tidak ada yang harus dilakukan lagi. 2025 semua proses, tahapan sudah selesai.

Saya lihat di sini, ada pembahasan untuk tahun 2029. KPU memasukkan kegiatannya itu dari sekarang. Penyiapan regulasi Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2029. Apa harus dari 2024 kita siapkan? 2025? Apa betul itu regulasi yang harus disiapkan selama empat tahun?

Dan saya juga ingin mempertanyakan. Saya mendapatkan informasi terkait penyimpangan belanja perjalanan dinas. Tercatat KPU belum mengembalikan sisa kelebihan perjalanan dinas sebanyak Rp10,57 miliar. Belum dikembalikan ke kas negara. Jadi, ini nanti tolong dijelaskan.

Terakhir, terkait honor. Apakah sudah semuanya KPU berikan? Apa masih ada? Karena saya setiap detik, setiap hari, itu masuk, Pak Ketua, Pak Sekjen, banyak yang menyampaikan ke saya.

Jadi, sekali lagi saya ingin jawaban. Apakah semua honor ini sudah dibayar sampai mereka bertugas terakhir? *Toh*, hanya sampai Maret dibayar. April mereka enggak dibayar lagi atau bagaimana? Coba dijelaskan karena anggarannya semua tadi sudah Bapak jelaskan. Harusnya kalau sudah ada anggaran, hak mereka harus diberikan.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Waalaikumsalam warahmatullahi.

Cukup ya, ini mitra sudah

F-P.DEMOKRAT (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Tambah sedikit, Ketua

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Apalagi, Pak Muraz?

F-P.DEMOKRAT (H. MOHAMAD MURAZ, S.H., M.M.):

Sedikit saja. Sebentar.

Terima kasih, Pimpinan.

**Para Anggota Komisi II yang saya hormati,
Ketua KPU,
Bawaslu beserta sejajaran,**

Saya tanya saja sedikit, Pak. Ini kan Pagu indikatif sudah ada. Apa boleh Komisi II mengurangi anggaran atau mengubah pagu indikatif ini termasuk kegiatannya? Bagaimana ini?

Misalnya, kan tadi Bu Rezka juga sudah menyampaikan, Pemilu kita sudah berakhir awal tahun 2025. ada pengawasan pendataan berkelanjutan, pendataan berkelanjutan. Ada Pemilu berkelanjutan yang jumlahnya sampai 90 miliar. Tambah 23 miliar. Ada pendidikan, ya. Ada pendidikan pelatihan. Mungkin aturannya juga berubah nanti.

Pendidikan apa perlu dilakukan tahun 2025? Bisa enggak komisi II mengubah? Kalau enggak bisa, ya buat apa kita bahas-bahas lagi.

Terima kasih.

F-P.DEMOKRAT (Ir. HUGUA):

Tambahkan Pimpinan, satu.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Apalagi, Pak?

F-P.DEMOKRAT (Ir. HUGUA):

Oke. Terima kasih.

Pimpinan, Rekan-rekan Anggota, Mitra yang saya hormati,

Pertama, saya tadi tidak terlalu mengikuti acara, apa, presentasi tadi karena saya telat. Namun, di tengah jalan ada beberapa perkembangan pemikiran.

Jadi, 2024 ini kan kegiatan Pemilu maupun Pilkada selesai. Praktis, tahun ini begitu strateginya untuk menjaga kualitas Pilkada ini maksimal. Jadi, kemarin sempat viral itu. Intinya, sebetulnya bagaimana pengawasan. Sebetulnya. Pengawasan untuk meningkatkan kualitas Pemilu kemarin.

Sempat viral kita bicara *money politic*, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Menurut saya, kita lebih kepada proses edukasi masyarakat yang lemah sekali secara nasional. Edukasi pada level tingkatan. Di level KPU Bawaslu untuk kepada tim *ad hoc* mungkin terjadi.

Tetapi, bicara tentang teknis, tidak bicara tentang substansi. Bagaimana meningkatkan kualitas Pemilu? Misalkan, rakyat paham bahwa mereka datang ke TPS itu memilih pemimpin. Mereka paham makna Demokrasi. Mereka paham makna kepemimpinan negara ke depan. Itu yang kurang. Lemah pendidikan politiknya ke masyarakat.

Kita lebih banyak habiskan anggaran *totally cost* untuk penyelenggaraan teknis. Bagaimana peran Gakkumdu, menurut saya, masyarakat tidak terlalu paham. Kalau ada pelanggaran, terus mereka ke mana? Akhirnya, lari ke Bawaslu. Ternyata, Bawaslu juga tidak bisa muat lari ke mana.

Saya kira, beralasan pendapat dari Pak Gaus tadi. Anggota DPR itu negarawan dan kalau memberikan materi ke masyarakat itu jauh lebih menggigit daripada teman-teman di teknis, KPU/Bawaslu, misalkan bicara teknis ke bawah. Yang menjadi aneh dan sangat langka adalah dari sekian total triliunan anggaran, biaya untuk pendidikan, diseminasi, mempromosikan mana demokrasi ini lemah.

Jadi, tadi misalkan Pak Gaus. Di komisi lain untuk supaya DPR itu punya makna di tengah-tengah masyarakat, ada memberikan makna-makna berkaitan dengan edukasi, berkaitan dengan bangsa dan negara kesatuan, dan juga bagaimana makna-makna demokrasi. Misalkan di Komisi II, masa hanya tiga kali?

Saya juga tidak habis pikir kenapa bisa begitu. Kita semua anggaran lari kepada hal-hal teknis saja. Padahal negara ini bukan persoalannya bukan di teknis. Cara pandang masyarakat, *it is ecosystem*. Yang jarang sekali edukasi ini turun ke bawah. Yang Bawaslu baru tiga tahap di sini. Baru tiga. Laporan TA baru tiga. Ya, *alhamdulillah*, Bawaslu punya *concern* bagaimana negara ini ke depan. KPU belum ada sampai hari ini.

Pertanyaannya, kapan kita lakukan, bagaimana, *How to increase the quality of Pemilu?* Kapan? Nanti tahun 2025 sudah selesai. 2026 sudah selesai. Sekarang mestinya. Sekarang mestinya. Sekarang mestinya. Saya kira ini tolong dipikirkan. Bagaimana ini?

Kedua. Benar, saya setuju. Mengubah *icon cow* di dalam sistem keuangan negara itu adalah pelanggaran konstitusi. Bukan pelanggaran yang berkaitan, pelanggaran undang-undang maksud saya. Bukan persoalan salah dan tidak salah. Saya kira memang satuan tiga perlu kita dapat sebelum pembahasan APBN untuk mitra kita ke depan.

Saya kira itu.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Cukup ya, ini.

Kita ini masih ada dua tahap lagi *loh* ini.

F-PPP (Dra. Hj. MUNAWAROH):

Tiga hal saja.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Ya.

Silakan. Bu

F-PPP (Dra. Hj. MUNAWAROH):

Nggih.

Terima kasih.

**Pimpinan dan Teman-teman Komisi, serta
Mitra dari KPU maupun Bawaslu,**

Yang pertama. Ketika realisasi anggaran disampaikan, itu mungkin akan tidak menjadi pertanyaan ketika juga capaian realisasi kegiatan disampaikan. Sehingga, mungkin nanti dalam pembahasan yang lebih lanjut akan disiapkan itu.

Kemudian, yang kedua. Pemilihan di daerah otonomi baru tadi seperti yang disampaikan. Apakah pemilihan serentak itu tidak termasuk yang di daerah otonomi baru, sehingga dianggarkan kembali di 2025? Yang khususnya ada kan yang di Papua. Kebetulan kami kemarin dari sana dan mereka sudah persiapan juga untuk melaksanakan itu.

Kemudian. Benar, sosialisasi untuk Pilkada serentak ini perlu di perbanyak. Karena pemilu legislatif kemarin kan calegnya banyak, sehingga banyak yang melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Itu pun ternyata juga masih banyak kekurangan-kekurangan. Apalagi *nih*, nanti calonnya tidak sebanyak ketika Pemilu. Sehingga, partisipasi masyarakat biasanya ketika Pilkada itu memang lebih rendah dari Pemilu.

Sehingga, semua tadi sudah mengusulkan supaya sosialisasi dan pendidikan politik pada masyarakat itu ditingkatkan. Informasi memang dari Bawaslu tiga kali. Sementara dari KPU belum ada. Sehingga, mungkin ini yang kita inginkan hari ini disepakati. Sehingga, kita bisa lebih awal untuk melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Sehingga, partisipasi masyarakat di Pilkada serentak nanti akan lebih meningkat. Setidaknya sama dengan ketika Pemilu.

Saya kira itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI
/F-P.NASDEM):**

Terima kasih, Bu Munawaroh.

**Bapak/Ibu sekalian,
Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, dan juga
Ketua KPU dan Bawaslu,**

Apa yang tadi disampaikan oleh seluruh anggota, itu dicatat dengan baik dan disiapkan semua jawabannya. Yang nanti akan kita dalam akan kita bahas di pembahasan berikutnya.

Jadi, semua yang dari anggota yang tadi disampaikan semua, harus tercatat dengan baik dan nanti dijawab oleh KPU dan Bawaslu pada rapat pembahasan. Jadi, pada rapat pembahasan, termasuk dari, apa, Bu Rezka, dari tadi, "Bisa enggak dikurangi *pagwa*, pagu indikatif ini semua?" Itu semua nanti kita apa bahas dan harus dijawab semuanya oleh KPU dan Bawaslu.

Termasuk terkait dengan soal evaluasi dan laporan. Termasuk satuan tiganya, itu juga nanti disiapkan untuk menjadikan bahan pembahasan untuk pagu anggaran 2025.

Saya rasa cukup ya?

F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):

Interupsi, Pimpinan.

Tadi yang terkait honor, tapi saya mau dijelaskan.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Yang honor. Yang pasti itu honor. Sudah beres semua belum?

Silakan

KETUA KPU RI (HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.):

Terima kasih, Pimpinan.

Terima kasih, Bu Rezka.

Jadi, situasi itu dialami di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Anggaran 2023 itu ada yang kurang. Yang kemudian baru dimasukkan, kurang satu bulan yang kemudian baru dimasukkan di tahun 2024. Sehingga, untuk bisa sampai kepada pencairan harus di-*review*.

Maka, kemudian boleh dikatakan terlambat. Di antaranya, karena baru dianggarkan 2024 dan harus di-*review*. Dan itu sepengetahuan kami satu-satunya di Kabupaten Banjar dan sudah dibayarkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Kabupaten Banjar saja itu?

F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):

Iya.

Interupsi. Pimpinan.

Kabupaten Indramayu?

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Untuk di Kabupaten Indramayu juga masih di-*review* oleh BPKP, seperti yang di Kabupaten Banjar juga tadi di-*review*-nya oleh BPKP.

F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):

Ya. Berarti bukan satu-satunya Kabupaten, Pak. Ini masih ada data yang lain.

Jadi, nanti Pimpinan, saya sekali lagi menegaskan ini haknya dari *ad hoc*. Bapak menyampaikan anggaran sudah semua tadi dipaparkan, anggaran untuk honor *ad hoc* segala macam. Tapi, mereka masih ada yang belum menerima honoronya sebagai PPK/PPS. Hitungan bulan mau dilantik Presidennya, mereka masih belum dibayar.

Jadi, sekali lagi saya minta KPU selesaikan semua honor *ad hoc*. Yang belum selesai, dipercepat.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Jadi catatan KPU untuk segera diselesaikan.

Bawaslu enggak ada? *Ad hoc*-nya sudah beres semua?

KETUA BAWASLU RI (RAHMAT BAGJA, SH. LL. M):

Kemarin yang banyak, beberapa yang sudah disampaikan oleh Anggota. Sudah kami tindak lanjuti. Semua sudah diselesaikan. Sumatera Barat dan kawan-kawan sudah selesai, Pak. Ada beberapa daerah yang belum selesai, sudah kita selesaikan.

Ini menunggu laporan lagi dari teman-teman di bagian biro keuangan. Karena, hampir semua sudah selesai. Yang bermasalah ketika yang bersangkutan tidak punya rekening, dan lain-lain, ataupun laporan belum selesai. Tapi, laporan kemarin sudah dibantu sesuai dengan arahan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II. Kita membantu untuk pembuatan laporan yang bersangkutan, sehingga bisa dibayarkan.

Insy Allah, sudah selesai untuk bulan Juni ini.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Selesai ya?

KETUA BAWASLU RI (RAHMAT BAGJA, SH. LL. M):

Sudah selesai semua, Pak

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Sudah selesai.

Oke. Tinggal KPU. Nanti Banjar dan Indramayu untuk dipercepat.

Terima kasih.

**Pimpinan,
Anggota Komisi II,**

Kita akan lanjutkan pada kesimpulan.

Bisa ditayangkan?

Semuanya saja langsung.

**Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua
Komisi Pemilihan Umum RI dan ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum RI**

1. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia sebagai berikut:
 - a. KPU RI:
 - Realisasi APBN tahun 2023 sebesar Rp19.424.808.435.401,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp20.256.596.163.000,00 atau sebesar 96,88%;
 - Realisasi APBN tahun 2024 (per tanggal 28 Mei 2024) sebesar Rp20.952.075.872.941,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp28.398.893.459.000,00 atau sebesar 73,78%;
 - Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp3.062.309.327.000,00.
 - b. untuk Bawaslu RI :
 - Realisasi APBN tahun 2023 sebesar Rp8.586.440.489.567,00 dari pagu alokasi anggaran tahun

2023 sebesar Rp9.943.019.129.000,00 atau sebesar 86,36%;

- Realisasi APBN tahun 2024 (per tanggal 31 Mei 2024) sebesar Rp5.832.103.838.416,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp11.611.620.116.000,00 atau sebesar 50,23%;
- Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp2.416.945.124.000,00.

Jadi, ini kita setuju ya untuk dibahas di pembahasan berikutnya?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi II DPR meminta kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2024 dan rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan (satuan tiga) beserta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI sebagai bahan pendukung Rapat Pembahasan RAPBN Tahun 2025 yang akan datang.

Cukup ya, satuan tiganya.

Jadi, sebelum kita melakukan pembahasan RAPBN tahun 2025, satuan tiga pagu alokasi anggaran tahun 2024 harus disampaikan ke Komisi II DPR RI.

F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):

Ya, tambahan sedikit, Ketua.

Ini satuan tiga dari dua ribu?

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

2024.

F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):

2023?

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Perlu?

F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):

Perlu, Pimpinan

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Kalau perlu, ditambahkan saja.

F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):

Disebutkan tahunnya, Ketua

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Ya. Jadi,

2. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk segera menyampaikan pagu alokasi anggaran tahun 2023 dan tahun 2024.

Tambahin.

F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):

Baik.

Tambahan sedikit ,Pimpinan.

Ini nanti penyerahan satuan tiganya bukan hitungan menit sebelum rapat, Pimpinan. Jadi, kita juga bisa lihat. Ini kebiasaan. Tadi rapat baru jam 10 bahannya dikasih. *Gimana* kita mau baca?

Jadi, Ketua, ini jangan nanti kita mau bahas, nanti satu jam lagi baru satu jam ini diberikan. Tolong ini diperhatikan juga untuk Sekretariat.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Ya.

Seminggu sebelum rapat pembahasan yang diminta sudah masuk di Sekretariat Komisi II, ya. Nanti diingatkan Komisi oleh Sekretariat Komisi II.

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Dengan demikian.

F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):

Izin, Pimpinan.

Interupsi, Pimpinan, sedikit. Sebelum kita tutup, Pimpinan.

Kita sebagai mitra dari penyelenggara Pemilu, terkhusus untuk KPU, sekali lagi saya mengingatkan. Izin, Pimpinan. Penyimpangan belanja perjalanan dinas yang belum dijawab.

Kalau hari ini tidak bisa dijawab oleh KPU, apa, apa Ketua KPU mau jawab sekarang?

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Satu poin, Pimpinan. Terkait pertanyaan yang sudah banyak juga di berita *online*, tentang 10,57 miliar perjalanan dinas yang belum dikembalikan ke kas negara oleh KPU.

Silakan.

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI /F-P.NASDEM):

Sudah kesimpulan. Jadi, kita itu nanti bahas pada pembahasan saja. Jadi semua yang terkait dengan pertanyaan, terus juga masukan dan lain-lain, kita bahas pada saat pembahasan berikutnya.


Pimpinan mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ketua KPU, Ketua Bawaslu beserta jajaran, serta Pimpinan/Anggota Komisi II DPR RI yang telah hadir pada rapat hari ini.

Dengan demikian, rapat kita bisa akhiri.

Alhamdulillah rabbil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II DPR RI**


Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
197504202002122002